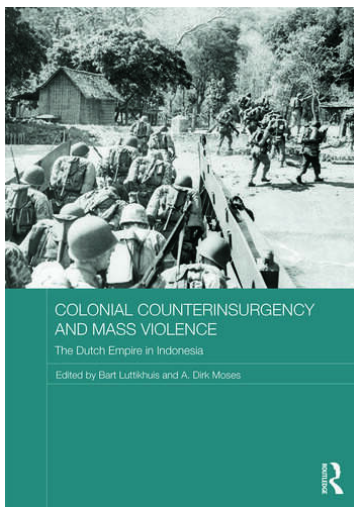


Melihat Periode Revolusi Indonesia dari Sisi yang Lain

GRACE LEKSANA

Departemen Sejarah, Universitas Negeri Malang
Email: grace.leksana.fis@um.ac.id



Title:

Colonial Counterinsurgency and Mass Violence:
The Dutch Empire in Indonesia

Author:

Bart Luttikhuis & Dirk Moses

Publisher:

Routledge (2014)

Pages:

xii + 358

ISBN:

978-0-415-85683-6

Bagi pembaca di Indonesia, istilah *counterinsurgency* (pemberontakan, kekacauan) hampir tidak pernah digunakan untuk menggambarkan perang kemerdekaan atau periode Revolusi pada 1945-1949. Bagi kita, peristiwa Revolusi seolah sudah jelas: ini adalah periode paling penting dalam sejarah, dimana kita mendirikan dan mempertahankan sebuah negara bangsa. Siapa kawan dan lawan juga sangat jelas. Belanda adalah musuh yang mencoba kembali berkuasa dan Indonesia adalah korban yang melawan sampai titik darah penghabisan. Jika timbul korban jiwa, keterpaksaan untuk migrasi, atau kerusakan infrastruktur, hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi perang. Petani yang harus menyerahkan hasil panennya untuk dijadikan logistic gerilyawan, atau keluarga yang bercerai berai karena perang gerilya, dianggap sebagai *pengorbanan* bagi negara. Narasi-narasi heroisme ini seringkali membuat kita, masyarakat Indonesia, semakin enggan untuk melihat periode Revolusi sebagai masa-masa yang dipenuhi dengan kekerasan. Kita menelan begitu saja bahwa Revolusi adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dan cenderung abai pada kompleksitas dimensi yang muncul dalam peristiwa tersebut. Pengabaian inilah yang coba diruntuhkan oleh editor Bart Luttikhuis dan Dirk Moses dalam buku *Colonial Counterinsurgency*. Di sisi lain, buku ini juga mencoba menggugat pengabaian yang terjadi di Belanda sendiri, yang memandang bahwa kekerasan yang terjadi

di periode ini hanyalah sebuah 'ekses'. Melalui 15 artikel dari beragam penulis Belanda dan Indonesia, buku ini menganalisa berbagai dimensi kekerasan yang terjadi selama perang dekolonisasi (istilah yang digunakan dalam buku ini) mulai dari kekerasan yang dilakukan Belanda dalam penaklukan wilayah selama masa kolonial, hingga praktik-praktik memorialisasi kekerasan yang dilakukan di masa kini.

Buku ini diangkat dari edisi khusus *Journal of Genocide Research* yang diterbitkan pada Desember 2012. Dalam pengantarnya, para editor menjelaskan bahwa diskusi di Belanda tentang kekerasan pada periode tersebut semakin berubah. Jika awalnya pembicaraan tentang kekerasan yang dilakukan oleh Belanda hampir tidak ada, kini aksi polisionil 1945-1949 semakin dipertanyakan. Peristiwa kekerasan yang mulanya dianggap sebagai ekses atau peristiwa insidental, kini mulai terlihat sebagai tindakan struktural dan sistematis, terlebih setelah dikeluarkannya hasil penelitian gabungan tentang perang dekolonisasi oleh sejumlah lembaga penelitian di Belanda yang memperkuat karakter kekerasan struktural tersebut (*Beyond the Pale: Dutch Extreme Violence in the Indonesian War of Independence, 1945-1949*, 2022). Perubahan ini tentunya menimbulkan beragam pertanyaan tentang kekerasan itu sendiri, misalnya apakah ini berarti Belanda telah melakukan kejahatan perang? Bagaimana kekerasan ini dapat muncul? Apakah kekerasan merupakan bagian yang tidak direncanakan, atau sebenarnya ia merupakan bagian integral dari penguasaan kolonial? Sejauh mana para pemimpin sadar akan kekerasan tersebut, dan apakah mereka bertanggung jawab? Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini, para editor menysar dua hal. Pertama, mereka ingin menstimulasi perdebatan tentang kekerasan pada masa kolonial dan dekolonisasi di Indonesia di luar komunitas masyarakat Belanda atau Indonesia. Sejauh ini, peristiwa kekerasan tersebut hanya berkuat dalam sejarah Indonesia atau Belanda saja, padahal komunitas global juga dapat mempelajari lebih jauh kasus ini untuk memahami keterkaitan antara kolonialisme, kekerasan, dan kemerdekaan. Kedua, buku ini juga dimaksudkan untuk memikirkan ulang perdebatan di Belanda dan Indonesia dengan sejumlah kategori dan konsep yang dikembangkan oleh para peneliti genosida dan kolonialisme.

Buku ini dibagi menjadi tiga tema utama, yaitu penaklukan (kembali), kekerasan Indonesia, serta representasi dan ingatan. Bagian akhir dari buku ini ditutup dengan epilog yang ditulis oleh Remco Raben. Bagian pertama, tentang penaklukan memfokuskan pada praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dalam upayanya menguasai Indonesia. Artikel oleh Petra Groen tentang perang kolonial dan etika militer pada 1816-1914, berangkat dari argumen Henk Schulte Nordholt yang berpendapat bahwa rezim kolonial Belanda merupakan negara kekerasan (*state of violence*). Groen kemudian melacak strategi militer yang dikembangkan oleh Belanda sejak

1816 dan menemukan bahwa Belanda berusaha menghindari perang, terutama perang gerilya. Sebaliknya, pemerintah kolonial menerapkan strategi yang memunculkan kekaguman (*strategy of awe*) dengan menunjukkan kekuatan, membuat pusat kekuasaan, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, seperti di Aceh, strategi ini tidak berhasil sehingga berujung pada perang. Dengan kondisi tersebut, maka Belanda melancarkan *strategy system benteng*, dimana pasukan Belanda secara perlahan menguasai area lawan. Kedua adalah penghancuran total area tersebut, dan ketiga adalah melancarkan kekerasan pada pasukan lawan. Secara umum, Groen menyimpulkan bahwa strategi penguasaan Belanda di Indonesia didominasi oleh kekerasan dan menciptakan rasa takut. Masih tentang Aceh, Emmanuel Kreike melihat sisi lain dari perang Aceh, yaitu taktik bumi hangus yang dilakukan Belanda sebagai bagian dari strategi kontroversial untuk menghancurkan bangsa Aceh. Kreike lebih jauh menunjukkan bahwa perang Aceh tidak hanya berakibat jatuhnya korban jiwa, migrasi, maupun trauma, tetapi juga penghancuran sistematis terhadap infrastruktur lingkungan, sawah, kebun dan irigasi, yang menyebabkan penyakit, malnutrisi dan kelaparan. Kreike bahkan sampai pada kesimpulan bahwa kasus Aceh merupakan sebuah contoh genosida tidak langsung (*indirect genocide*) karena sebagian korban di Aceh meninggal bukan oleh tindakan kekerasan secara langsung oleh pelaku, namun kematian perlahan yang disebabkan oleh rusaknya infrastruktur lingkungan.

Artikel dari Remy Limpach menyoroti kekerasan massal Belanda dalam perang kemerdekaan, dan menyimpulkan bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara reguler, massif, dan dalam skala besar. Dalam telaah kasusnya, yaitu di Sulawesi, Malang, dan Cililitan, memperlihatkan bahwa mayoritas pasukan Belanda tidak mengalami situasi tempur secara langsung. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan eskalasi kekerasan, yaitu permasalahan internal militer seperti kurangnya disiplin, latihan, dan personel; perang anti gerilya yang bergantung pada perintah komando di tempat secara langsung; dan pembalasan setelah mengalami kekerasan pada masa pendudukan Jepang. Di tingkat otoritas, kekerasan dimaklumi atau bahkan dibenarkan yang menurut Limpach mencerminkan keabaian, penyangkalan dan juga paradigma kolonial dan rasis. Analisa lain yang menjelaskan mengapa kekerasan dapat dilakukan oleh pasukan Belanda dikemukakan oleh Peter Romijn dalam artikelnya tentang para sukarelawan perang dari Belanda. Sebelum diberangkatkan, para sukarelawan ini percaya bahwa perang di Indonesia adalah sebuah aksi membebaskan wilayah mereka dari cengkeraman Jepang. Mereka membangun kaitan logis antara perlawanan terhadap Jerman dengan upaya pembebasan tersebut. Perang terhadap Indonesia merupakan upaya Belanda untuk menghancurkan ekstermis yang tidak ingin Indonesia kembali ke tangan Belanda. Framing inilah yang mampu mendorong transgresi kekerasan dalam perang menjadi sesuatu yang perlu dilakukan atau memotretnya menjadi

narasi yang dapat diterima. Sama seperti para sukarelawan, artikel Roel Frakking juga membahas kelompok pribumi penjaga perkebunan (*plantation guards*) yang dibentuk untuk mengamankan aset perkebunan Belanda. Penjaga ini muncul karena pemerintah Belanda memutuskan bahwa pengamanan perkebunan berada di tangan perusahaan sendiri. Pembentukan penjaga perkebunan ini, menurut Frakking, justru menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah Belanda tidak memiliki kebijakan jangka panjang yang jelas untuk Indonesia, selain hanya menguasai wilayah tersebut. Dampak dari kehadiran penjaga perkebunan ini perlu diteliti lebih lanjut, terutama kaitannya dengan munculnya tentara Indonesia sebagai pemilik tunggal perkebunan yang di beberapa kasus memunculkan konflik dengan warga sekitar di masa kini.

Bagian kedua buku ini berfokus pada kekerasan yang terjadi di pihak Indonesia. William H. Frederick dalam artikelnya menyoroti pembunuhan terhadap orang Belanda dan Eurasia di masa Revolusi. Frederick mengkritisi terminology genosida singkat (*brief genocide*) yang dikemukakan oleh Robert Cribb untuk menggambarkan kekerasan terhadap kelompok ini yang terjadi selama periode Bersiap. Menurut Frederick, kekerasan tersebut tidak dapat dikatakan singkat, karena durasinya melampaui masa Bersiap. Selain itu, warga Belanda dan Eurasia menjadi korban kekerasan karena perpaduan antara etnisitas dan kesetiaan nasionalis mereka, bukan semata karena basis etnisitas semata. Terminologi genosida juga diangkat oleh Mary Somers Heidhues tentang kekerasan anti Tionghoa di Jawa pada 1945-49. Berangkat dari analisa kasus di Tangerang dan Nganjuk, Heidhues menunjukkan bahwa istilah genosida tidak tepat diaplikasikan dalam kasus ini, karena jumlah korban yang tergolong rendah, kekerasan yang terjadi dalam situasi tertentu (umumnya saat pertempuran atau evakuasi), serta belum adanya bukti yang menunjukkan niat atau intensi para pelaku untuk menyingkirkan kelompok Tionghoa. Perdebatan yang berbeda diangkat oleh artikel dari Harry Poeze tentang konflik internal di Indonesia pada 1945-49. Poeze menekankan bahwa kekerasan internal seperti Darul Islam atau peristiwa Madiun sangat bervariasi dan berakar pada kondisi regional tertentu. Poeze bahkan menyarankan istilah Bersiap yang semula hanya mengacu pada kekerasan terhadap Belanda dan Eurasia, harus diperluas untuk memasukkan kekerasan internal di Indonesia.

Pada tema terakhir, yaitu tentang representasi dan memori, dua artikel menyoroti peran propaganda dalam perang dekolonisasi. Gerda Jansen Hendriks mengangkat propaganda film yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan ditayangkan di televisi sehingga mencapai masyarakat luas. Propaganda tersebut menekankan gambaran bahwa Indonesia belum mampu berdiri tanpa bantuan Belanda. Film-film propaganda ini hampir tidak menyinggung perihal kekerasan yang dilakukan di masa perang. Sementara itu, Muhammad Yuanda Zara menyoroti propaganda media massa yang dibuat di sisi Indonesia

selama Revolusi, 1945-48. Representasi kekerasan di media cenderung bernada pro-Republik dan dinarasikan dalam bingkai heroisme. Hubungan antara negara dan media merupakan hubungan sukarela karena keduanya saling membutuhkan. Bahkan Yuanda berargumen lebih lanjut bahwa propaganda tidak hanya bergantung pada apparatus negara yang kuat, namun juga di tengah media yang cukup independen.

Sementara itu, Stef Scagliola mengangkat isu kejahatan perang Belanda dan proses pengakuannya yang masih belum selesai hingga saat ini.¹ Menurutnya, salah satu kesulitan muncul dari kesepakatan Belanda dan Indonesia untuk tidak mengartikulasikan kekerasan kedua belah pihak, sebagai bagian strategi netralitas politik. Di sisi lain, Paul Bijl mencoba menawarkan penjelasan mengapa narasi kekerasan seolah dilupakan oleh masyarakat Belanda. Bijl mengkritik pendekatan dikotomis antara mengingat dan melupakan, dengan berargumen bahwa melupakan tidak berarti ingatan itu tidak ada atau hilang. Ia kemudian memperkenalkan istilah *memorability*, derajat dimana sebuah peristiwa mudah atau sulit untuk diingat. Inilah yang terjadi dengan ingatan kekerasan dalam masyarakat Belanda, bahwa kekerasan kolonial itu tidak pernah hilang dalam ingatan, namun tidak ada kerangka nasional yang dapat menjelaskan kekerasan itu dan tidak ada Bahasa yang mampu mendiskusikannya sebagai bagian dari sejarah Belanda. Dalam praktik memorialisasi di Indonesia, Katharine McGregor mengangkat kasus kekerasan Westerling di Makassar yang diingat secara berbeda. Dalam publikasi-publikasi resmi pemerintah, peristiwa tersebut dipotret sebagai pengorbanan nasional, atau bahkan dimarjinalkan dalam ingatan kolektif bangsa. Namun seiring dengan upaya masyarakat lokal, perubahan pasca Reformasi, dan meningkatnya aktivisme HAM, klaim untuk keadilan sejarah dalam kasus Westerling semakin menguat. Berbeda dari McGregor, Iris van Ooijen dan Ilse Raaijmakers memotret praktek memorialisasi di Belanda yang memperlihatkan kelindan antara ingatan pasca perang dan pasca kolonial. Melalui studi kasus peringatan 4 Mei yang memperingati PD II dan kasus Kamp Vught, bekas kamp konsentrasi yang difungsikan menjadi pusat penerimaan tentara KNIL dari Maluku, kedua pengarang menunjukkan bahwa ingatan pasca kolonial tidak pernah tertutup oleh ingatan pasca perang.

Poin penting terakhir yang diangkat oleh buku ini juga digarisbawahi oleh Remco Raben dalam epilognya. Pertanyaan utama yang coba diajukan oleh kedua editor dan para penulis adalah apakah kekerasan yang terjadi di masa Revolusi ini dapat dikategorikan sebagai genosida? Akan tetapi, menurut Raben, mereduksi kekerasan menjadi kategori yang jelas seperti antikolonial, subaltern, atau genosida singkat, justru akan mengaburkan beberapa poin penting. Kategori ini gagal menjelaskan mengapa tindakan kekerasan muncul

1) Rutte mengungkapkan permintaan maafnya pada Februari 2022, namun buku ini diterbitkan pada 2014.

dalam situasi tertentu, dan mengapa bentuk, pelaku, korban, dan motivasinya sangat beragam. Yang seharusnya menjadi fokus adalah intensi untuk membunuh dan dampak yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, Raben juga menyatakan bahwa konsep genosida bukan tak berguna sama sekali. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran implisit seperti prasangka, kesombongan kolonial, dan ide keberadaban justru menstimulasi, memungkinkan, dan membenarkan kekerasan masif.

Buku ini memang didominasi oleh sudut pandang para ilmuwan Belanda, meskipun beberapa artikel seperti yang ditulis oleh Poeze, Heidhues, dan Yuanda menonjolkan dinamika internal di Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa analisa-analisa yang ditampilkan dalam buku ini tidak berguna untuk konteks Indonesia. Justru sebaliknya, publikasi ini seharusnya bisa mendorong para sejarawan atau ilmuwan Indonesia untuk keluar dari bingkai heroisme nasionalistik yang membuat kita tidak belajar lebih dalam tentang aksi kekerasan yang terjadi selama Revolusi. Selain itu, pola-pola kekerasan yang dibahas oleh para penulis di buku ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah pola-pola yang dilakukan oleh Belanda, seperti strategi bumi hangus, mengeliminasi pemberontak pribumi (yang kemudian memukul rata seluruh warga), sesungguhnya juga menjadi pola yang sama yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warganya sendiri di masa pasca kemerdekaan dan pasca Reformasi, seperti dalam kasus Timor Leste, DOM Aceh, bahkan 1965-66. Dengan kata lain, sejarawan perlu meneliti lebih lanjut sejauh mana pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia semasa Revolusi diadopsi atau dipertahankan oleh tentara Indonesia sendiri untuk mempertahankan 'kedaulatan dan persatuan' bangsa.

Referensi

- Luttikhuis, Bart & Moses, Dirk (2014). *Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia*. Routledge.
- Oostindie, Gert (2022). *Beyond the Pale: Dutch Extreme Violence in the Indonesian War of Independence, 1945-1949*. Amsterdam University Press.